

BAB IV

MOTIF INDONESIA MENJADI MEDIATOR KONFLIK ARAB SAUDI-IRAN DALAM KASUS EKSEKUSI MATI NIMR AL-NIMR

A. Indonesia Ingin Diakui Sebagai Negara Middle Power

Berakhirnya Perang Dingin mengakibatkan meningkatnya pengaruh *soft power*, negara–negara *great power* mengalami kemunduran dan tidak mendominasi, berkurangnya penggunaan *hard power*, menyebabkan konsep negara *middle power* mengalami peningkatan popularitas serta reputasi dalam kancah hubungan internasional. Para ahli beserta pengamat dan praktisi Ilmu Hubungan Internasional berpendapat bahwa konsep *middle power* dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri dan juga karakter politik luar negeri suatu negara (Gilboa, 2009).

Ciri utama dari *middle power* adalah dengan penggunaan diplomasi publik, Gilboa berpendapat bahwa negara yang termasuk *middle power* cenderung menggunakan diplomasi public dalam strategi politik luar negerinya (2009). Negara *middle power* mempengaruhi hubungan internasional bergantung kepada seberapa efektif instrumen diplomasi public diimplementasikan dalam kebijakan politik luar negeri mereka.

Dewasa ini, konsep Middle Power merupakan konsep yang tergolong baru. Konsep ini diperdebatkan dunia internasional. Konsep ini muncul pada tahun 1589 melalui Bartolous Sassoferato Dan masih sering diperdebatkan hingga sekarang, Bartolous Sassoferato juga membagi negara kota menjadi tiga tipe : kecil, sedang, dan besar. Sassoferato menjelaskan bahwa :

“middle-sized states are the most lasting, since they are exposed neither to violence by their weakness nor to envy by their greatness, and the wealth and power being moderate, passions are less violent, ambitions find less support ... than in large states.”(Holbraad, 1984)

Saat ini middle power diartikan sebagai gagasan yang menghubungkan ukuran suatu negara dengan perilaku negara. Definisi *middle power* pada awalnya masih merujuk pada ukuran besar suatu negara saja atau luas *territorial* secara harafiah. Mengkategorikan negara merupakan hal yang menyulitkan karena tidak ada kriteria yang disetujui oleh semua pihak untuk dijadikan barometer. Selain itu, negara berukuran sedang juga belum menerjemahkan posisi mereka yang berada di tengah antara negara kecil dan besar kedalam perilaku politik luar negeri tertentu pada masa itu.

Indonesia sebagai negara middle power seperti yang tertera dalam visi misi Jokowi politik luar negeri Indonesia akan dijalankan dengan memberikan penekanan pada 4 (empat) prioritas utama, salah satunya adalah dengan meningkatkan peran global melalui diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Prioritas peran global ini akan dicapai melalui 8 (delapan) agenda aksi yaitu:¹

1. Membangun kapasitas untuk melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

¹http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf diakses pada 31 Agustus 2016

2. Mengedepankan dan aktif dalam mendorong kerjasama multilateralisme regional dan global, termasuk penguatan PBB, aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan mendorong reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional Bretton Wood khususnya World Bank dan International Monetary Fund (IMF)
3. Memperkuat peran Indonesia sebagai negara demokratis dan berpenduduk mayoritas Muslim moderat dalam mendorong kerjasama global dan regional untuk membangun demokrasi dan toleransi antar kelompok
4. Memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan di G20
5. Mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan illegal, perdagangan manusia, kelangkaan air, ketahanan energy, dan penyebaran narkotika.;
6. Meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan dan Truangular (KSST) sebagai bagian dari perjuangan membangun kerjasama internasional dan tatanan dunia yang lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan
7. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik (conflict resolution), penjagaan perdamaian (peace-keeping) dan bina perdamaian (peace-building)
8. Mendorong penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), OKI, dan Sekretariat ASEAN.

Dari data diatas sudah sangat jelas, dimasa kepemimpinan Jokowi, politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional lebih pada diplomasi publik yaitu sebagai negara *middle power*. Dalam kasus konflik Arab Saudi - Iran terkait eksekusi Nimr Al Nimr, Indonesia

menawarkan diri sebagai mediator, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara netral yang berhubungan baik dengan Arab Saudi dan Iran serta Indonesia tidak memiliki kepentingan geostrategis dan politis di kawasan Timur Tengah, Indonesia juga merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.²

Selain itu pemerintah Indonesia telah mengirim Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi guna menunjukkan keseriusan Indonesia membantu meredakan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran³ serta kunjungan ke Arab Saudi dan Iran ini untuk menunjukkan sikap netral Pemerintah Indonesia terhadap konflik yang terjadi diantara kedua negara.⁴

Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia menjadi mediator dalam menengahi konflik Arab Saudi – Iran.

B. Modalitas Indonesia sebagai mediator dalam konflik Arab Saudi-Iran

1. Indonesia dalam perdamaian di Timur Tengah

Konflik Palestina sudah terjadi sejak bertahun tahun lalu hingga saat ini belum terselesaikan. Indonesia terlibat dalam penyelesaian konflik Palestina sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Bahkan setelah Indonesia berganti kepemimpinan hingga Presiden Joko Widodo, konflik ini belum terselesaikan. Konflik ini pun telah membawa organisasi Internasional seperti PBB dan OKI untuk menyelesaikan konflik Palestina- Israel, namun tak kunjung terselesaikan.

²<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/15000071/Indonesia.dan.Mediasi.Konflik.Arab.Saudi-Iran?page=all>

³<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/15000071/Indonesia.dan.Mediasi.Konflik.Arab.Saudi-Iran?page=all>

⁴<http://www.voaindonesia.com/a/menlu-retno-mersudi-bertolak-ke-arab-saudi-dan-iran/3141309.html>

Di tengah terpuruknya aktor-aktor hubungan internasional , capaian Indonesia dalam pembangunan demokrasi, stabilitas keamanan, dan ekonomi menjadikan Indonesia layak berdiri tegak dalam pergaulan internasional khususnya di Timur Tengah. Oleh karenanya Indonesia dipandang mempunyai kapasitas untuk mengembalikan isu Palestina di dunia hubungan internasional.Indonesia berharap ini merupakan awal bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam upaya penyelesaian damai di Palestina dan di Timur Tengah secara umum.⁵

Indonesia merupakan salah satu anggota dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indonesia bahkan ikut mendirikan OKI bersama 22 negara lainnya pada tahun 1970.Keterlibatan Indonesia dalam OKI saat itu bertujuan untuk memajukan kerjasama internasional dengan negara-negara Islam.⁶ Tujuan didirikannya OKI salah satunya adalah untuk meningkatkan solidaritas Islam diantara negara anggota, mengoordinasikan kerjasama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.⁷

Pada tahun 1993 Indonesia menerima mandat ketua *Committee of Six*, yang bertugas untuk memfasilitasi perundingan damai antara *Moro National Liberation Front* (MNLF) dengan

⁵<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/04/16/o5qb001-peran-ri-di-timur-tengah>.

⁶ Muhammad Faris Alfadh, 2012. Persepsi Gerakan Mahasiswa Islam Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah. Yogyakarta: Prudent Media. hal. 99.

⁷<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx> diakses pada 2 September 2016

pemerintah Filipina.⁸Perundingan ini telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali selama hampir 2 (dua) decade terakhir. Selama kekuatan dalam Organization Islamic Conference Peace for the Southern Philippines (OIC-PCSP), yang melanjutkan Committee of Six, Indonesia memimpin 4 (empat) kali pertemuan Tripartite antara GPH (Pemerintah Filipina)-MNLF-OIC PCSP.⁹

Sebagai wujud keterlibatan Indonesia dalam KTT OKI ke-5 tahun 2016, Pemerintah Indonesia memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Sebagai bentuk keprihatinan Indonesia terhadap memburuknya situasi di Palestina, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebutkan bahwa Indonesia siap membantu proses rekonsiliasi Palestina. Indonesia dan Dunia Islam siap melakukan langkah konkret untuk terus mendesak Israel menghentikan penjajahan dan kesewenangan Israel di Al-Quds Al-Sharif.

Pada KTT OKI 2016 di Turki, Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla dalam pidatonya menyerukan agar negara-negara OKI berkontribusi untuk perdamaian dan kesejahteraan global, serta mengajak Dunia Islam bersatu, dan juga Indonesia dapat berkontribusi dalam perjuangan membebaskan bangsa Palestina. Indonesia siap menjadi juru damai negara-negara Islam yang terlibat dalam perselisihan.

Selain dalam permasalahan konflik Palestina- Israel, Indonesia pun turut dalam menyikapi resolusi nuklir Iran, Indonesia yang pada tahun 2006-2008 menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, mendukung resolusi 1747. Dalam pembahasan rancangan resolusi yang dibuat tersebut, Indonesia telah mengajukan amendemen untuk mencantumkan bahwa

⁸ Muhammad Fakhry Ghafur, Revitalisasi Peran Indonesia di Organisasi Konferensi Islam (OKI), diakses dari <http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/443-revitalisasi-peran-indonesia-di-organisasi-konferensi-islam-oki> pada 22 Agustus 2016

⁹ Sunu Mahadi Sumarno, Peningkatan Diplomasi Indonesia di OKI: Tantangan, Peluang dan Arah Ke Depan, diakses dari <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/135-april-2011/1089-peningkatan-diplomasi-indonesia-di-oki-tantangan-peluang-dan-arrah-ke-depan.html> pada 22 Agustus 2016

setiap negara yang berpihak pada *Non Proliferasi Nuklir* memiliki hak untuk mengembangkan program nuklir dengan tujuan damai, dan rujukan mengenai perlunya menciptakan kawasan bebas senjata di Timur Tengah, serta perlunya perundingan dengan itikad baik agar dapat mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak.¹⁰ Meskipun Indonesia mendukung resolusi 1747, akan tetapi masukan yang diberikan oleh Indonesia tidak serta merta mendiskriminasi Iran, tidak pula mendukung anggota tetap Dewan Keamanan PBB, melainkan Indonesia mengimplementasikan amanat UUD 1945 demi terciptanya perdamaian dunia.

Indonesia juga menyatakan sikap abstain dalam pengumuman suara resolusi nomor 1803 tahun 2008. Sanksi yang merupakan perluasan dari sanksi sebelumnya ini berupa larangan berpergian bagi pejabat atau politisi, pengusaha, ilmuwan, banker atau siapapun yang terkait dengan pengembangan aktivitas nuklir Iran. Selain itu, ditetapkan juga pembekuan asset baik mereka yang terkait dengan aktivitas nuklir, larangan mengadakan hubungan dagang yang terkait dengan militer, pengawasan kapal-kapal yang beraktivitas keluar masuk Iran.¹¹

Inilah modalitas yang dimiliki Indonesia yang membuat Indonesia berani menjadi dalam konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran. Sebagai negara demokratis yang mayoritas beragama Islam, Indonesia menginginkan persatuan sesama muslim, meskipun terdapat perbedaan didalamnya.

Melalui OKI, Indonesia memiliki keinginan untuk membangun Dunia Islam dalam, ini dibuktikan dengan Indonesia keaktifan Indonesia dalam menyuarakan persatuan di Dunia

¹⁰ Alasan Dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747, diakses dari http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=7939&coid=3&caid=31&gid=3 pada 24 Agustus 2016

¹¹ <http://www.dw.com/id/indonesia-abstain-soal-iran/a-3166832> diakses pada 24 Agustus 2016

Islam. Keaktifan Indonesia di KTT OKI bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia di dunia internasional.

Dalam konferensi OKI, Indonesia mendorong konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran agar segera diselesaikan. Penyelesaian permasalahan konflik Arab Saudi-Iran diperlukan kerjasama yang baik dengan negara-negara Islam lainnya melalui wadah OKI. Arab Saudi dan Iran adalah negara yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan Indonesia. Kedua negara ini memiliki posisi dan peran dalam dunia internasional serta hubungan diplomatik yang sudah berlangsung lama dengan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia berharap agar konflik ini tidak membesar dan segera dapat diselesaikan sehingga tidak menimbulkan perang.

2. Penduduk Muslim Terbesar di dunia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Setidaknya 87.2% atau sekitar 207.2 juta orang memeluk agama Islam, sekitar 6.9% atau 16.5 juta orang beragama Protestan, 2.9% atau 6.9 juta orang beragama Katolik, dan 1.7% atau 4 juta orang beragama Hindu, dan sisanya adalah umat Buddha.

Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, membuat Indonesia memiliki hubungan emosional yang tinggi dengan kawasan di Timur Tengah yang identik dengan Islam. Hubungan antara Indonesia dan kawasan Timur Tengah, sudah terjalin ratusan tahun yang lalu ketika Islam menyebarkan ajarannya ke seluruh pelosok bumi yang banyak dilakukan oleh para pedagang muslim, baik mereka yang berbangsa Persia, Arab, maupun India (Gujarat). Indonesia sebagai

negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, lebih menjadi sorotan negara Timur Tengah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan sebagainya.¹²

Tabel 1.1 Presentase Jumlah Penduduk 2010¹³

	Presentase (dari populasi total)	Angka Absolut (juta)
Muslim	87.2	207.2
Kristen	6.9	16.5
Katolik	2.9	6.9
Hindu	1.7	4.0
Buddha	0.7	1.7
Konghucu	0.05	0.1

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010

Meskipun penduduk Indonesia memeluk agama Islam, tetapi Indonesia sendiri bukan merupakan negara Islam. Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi, prinsip-prinsip Islam sangat berperan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, agama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan agama merupakan suatu identitas masyarakat Indonesia.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dapat dilihat dari banyaknya pengiriman jamaah haji setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara

¹² DR. Sidik Jatmika, MSi , Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, hal. 160

¹³<http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>

pengirim jamaah haji terbanyak di dunia. Tercatat pada tahun 2006 Indonesia memberangkatkan sekitar 205.000 jama'ah haji, jika biaya haji sekitar 2577,00 dolar AS, maka dana yang terkumpul adalah sekitar 528.285.000.00 dolar AS, atau sekitar 4.860.222.000.000,00.¹⁴Setiap tahunnya, Mekkah dan Madinah dikunjungi oleh jutaan jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2012, jumlah jamaah haji Indonesia berjumlah 211.000 jamaah, akan tetapi pada kurun waktu 4 tahun belakangan (2013-2016) ini, kuota haji Indonesia dipotong sebesar 20% menjadi 168.800 jamaah. Pemotongan kuota haji ini dilakukan karena adanya proyek renovasi di Masjidil Haram Mekkah.

Indonesia merupakan rumah bagi kaum Sunni dan kaum Syi'ah. Meskipun begitu, Indonesia cenderung dapat menyelesaikan yang terjadi di Indonesia dan menjaga kerukunan beragama. Sebagai contoh, pada tahun 2011 terjadi konflik kekerasan berbau isu agama di Sampang, Madura. Pada akhir 2011, terjadi pembakaran puluhan rumah di Desa Karanganyam, Kecamatan Omben dan Desa Bluruan, Kecamatan Karang Penang. Kekerasan ini berlanjut pada 2012, tepatnya dibulan Agustus, terjadi pembakaran 10 rumah dan telah memakan korban jiwa. Konflik yang terjadi di Sampang ini telah mengakibatkan setidaknya 60 keluarga terusir dari kampung halamannya.

Dalam menangani konflik ini, Pemerintah Indonesia telah membentuk tim penanganan konflik yang terdiri dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan tim rekonsiliasi yang

¹⁴ Dr. Sidik Jatmika, (2014), Pengantar Studi Kawasan TImur Tengah, Yogyakarta: Maharsah, Hal. 159

dibentuk khusus oleh Presiden.¹⁵ Bentuk resolusi konflik Sunni-Syiah yang dilakukan oleh Pemkab Sampang adalah dialog dengan para ulama, rekonsiliasi dalam bentuk workshop, pembinaan terhadap masyarakat yang ada di lokasi konflik, dan pembenahan infrastruktur desa.¹⁶ Rekonsiliasi dengan bentuk dialog antara ulama-ulama Sunni maupun ulama Syi'ah terus dilakukan sampai sekarang.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim dengan mazhab Sunni, akan tetapi Pemerintah Indonesia tidak menganggap bahwa kaum Syi'ah yang merupakan minoritas itu sesat. Indonesia mampu untuk bersikap netral dalam konflik Arab Saudi dan Iran tersebut. Indonesia mampu menjaga kemajemukan agama di Tanah Air.

3. TKI dan WNI Indonesia di Timur Tengah

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Negara Timur Tengah khususnya negara Arab Saudi dan Iran. Setidaknya, pada tahun terdapat 980.891 TKI di Arab Saudi. Banyaknya kasus kekerasan terhadap TKI terutama di sektor domestik, maupun TKI yang bermasalah membuat Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi. Pada bulan Agustus 2011, Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan moratorium TKI di sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.

Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang penempatan TKI menjadi memuncak karena banyaknya TKI yang terkena kasus *overstayer*. Pemerintah Indonesia pada bulan Agustus tahun 2011 resmi memberlakukan moratorium untuk mencegah terjadinya

¹⁵ Koordinasi Antarlembaga dalam Penanganan Konflik, Studi Kasus : Tim Rekonsiliasi Sunno Syiah di Sampang (Jilid 2), diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1016-koordinasi-antarlembaga-dalam-penanganan-konflik-studi-kasus-tim-rekonsiliasi-sunni-syiah-di-sampang-jilid-2>, pada 22 Agustus 2016

¹⁶ Mundiroh Lailatul Manawaroh, Penyelesaian Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura, UIN Sunan Kalijaga, hal. 128

permasalahan yang lebih kompleks. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membenahi kualitas tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan pemerintah Indonesia berupaya agar pemerintah Arab Saudi mau membuat perjanjian ketenagakerjaan dengan Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi telah melakukan perjanjian bilateral tentang Penempatan dan Perlindungan TKI sector domestic pada 19 Februari 2014. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, Adiel M. Fakeih, di Riyadh, Arab Saudi. Tercapainya kesepakatan kedua negara untuk menandatangani perjanjian tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan *Joint Working Committee (JCW)* yang dibentuk oleh kedua negara. Penandatanganan perjanjian ini memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan TKI, serta memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi TKI yang bekerja pada pengguna jasa.¹⁷

Perjanjian bilateral tersebut membahas tentang pengakuan hubungan kerja melalui standar perjanjian kontrak kerja yang memuat jenis-jenis pekerjaan, serta besaran upah yang akan diterima oleh TKI, hak dan kewajiban pengguna jasa dan TKI serta masa perjanjian kerja dan cara memperpanjangnya. Dalam perjanjian ini juga memuat pemenuhan hak-hak TKI dalam penyediaan akses komunikasi, hari libur dalam seminggu dan cuti, paspor dipegang oleh TKI, pengaturan waktu kerja dan istirahat, system penggajian yang dilakukan dengan melalui jasa perbankan untuk TKI, Asuransi dan perawatan kesehatan, kontrol terhadap biaya penempatan, system online dalam rekrutment dan penempatan, guideline penempatan dan perlindungan TKI, mekanisme bantuan 24 jam (*call center*), dan juga kesepakatan konsuler

¹⁷<http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-ketenagakerjaan/497-ketenagakerjaan/13864-perjanjian-dengan-arab-saudi-harus-lindungi-tki> diakses pada 8 Juni 2016

untuk perlindungan dan partisipasi dan repartasi.¹⁸ Meskipun perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh kedua negara, hal ini tidak secara otomatis dapat mencabut monotorium TKI ke Arab Saudi. Monotorium baru akan dicabut apabila kedua negara dan *stakeholder-nya* mengimplementasikan semua poin-poin dalam perjanjian yang telah dibuat.

Masih berlakunya moratorium TKI ke Arab Saudi telah berdampak negative kepada Arab Saudi, yakni terjadinya keresahan bagi pengguna jasa TKI di Arab Saudi yang harus menangani sendiri pekerjaan rumah tangganya. Keberadaan para TKI yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) telah membantu meringankan pekerjaan rumah tangga pada majikan di Arab Saudi.¹⁹ Dengan kata lain, kebijakan moratorium tersebut telah membuat Arab Saudi para pengguna jasa TKI di Arab Saudi kekurangan jumlah tenaga pekerja informal.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai penghentian secara permanen penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor rumah tangga ke 21 negara di Timur Tengah pada Mei 2015.²⁰ Meskipun pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman TKI sektor Pekerja Rumah Tangga, permintaan TKI tetap berjalan di sektor ritel masih berlangsung. Pada 2012, perusahaan Bin Dawood Group yang bergerak di bidang ritel, supermarket, hotel, dan lain-lain membutuhkan sekitar 300 TKI untuk bekerja di bidang ritel. Bahkan, Abdul Razzaq D Bin Dawood datang langsung ke Indonesia untuk mencari TKI formal yang siap bekerja dibidang ritel. Selain perusahaan Bin Dawood Group, Landmark Group juga memerlukan 5000 salesman dan storehelper laki-laki dari Indonesia. Landmark Group merupakan perusahaan yang memiliki ribuan toko eceran di seluruh Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Selain itu, banyak

¹⁸ <http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-ketenagakerjaan/497-ketenagakerjaan/13864-perjanjian-dengan-arab-saudi-harus-lindungi-tki> diakses pada 8 Juni 2016

¹⁹ Nissa Juandea, Dampak Penerapan Kebijakan Moratorium Bagi TKI ke Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia, hal. 598

²⁰ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/15/o0zs9e319-dpr-sayangkan-pengawasan-moratorium-tki-lemah> diakses pada 23 Agustus 2016

rumah sakit di Timur Tengah meminta perawat dari Indonesia.²¹ Menurut Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas II Tenaga Kerja Luar Negeri (PHK-TKLN), drg. Elia Rosalina Sunityo, MARS, MS, pasca rapat koordinasi perlindungan BNP2TKI di Jakarta pada oktober 2014, Duta Besar Arab Saudi membutuhkan 1.000 pekerja perawat lulusan Sarjana (S.1), yang akan dipekerjakan di seluruh Rumah Sakit Pemerintah/Militer.²²

Dari uraian diatas diatas, maka dapat diringkas bahwa meskipun Indonesia telah memberlakukan moratorium TKI ke Arab Saudi di sektor Pekerja Rumah Tangga, hal tersebut tidak mengurangi kebutuhan Arab Saudi terhadap TKI Indonesia di sektor formal dan ritel. Kebutuhan Arab Saudi akan TKI di sektor formal dapat menjadi nilai plus bagi Indonesia. Dengan begitu, Indonesia memiliki potensi posisi strategis untuk dapat menjadi mediator dalam konflik Arab Saudi dan Iran ini.

Pada tanggal 9-10 Agustus 2011, KBRI Tehran telah melakukan pelayanan Konsuler “one day service”. Pada tanggal 13-17 Oktober 2011, Satuan Petugas Perlindungan WNI dari beberapa kementerian Indonesia telah berkunjung ke Teheran yang bertujuan untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Teheran dan KBRI guna membahas upaya perlindungan WNI di Iran.

Perlindungan WNI dan TKI merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Reformasi Sistem Penempatan

²¹<http://www.bnptki.go.id/read/11128/Landmark-Group-Buka-Peluang-untuk-5000-TKI> diakses pada 23 Agustus 2016

²²<http://www.bnptki.go.id/read/9399/BNP2TKI-Tawarkan-Ribuan-Lowongan-Kerja-Perawat-untuk-Akper-Pemda-ke-Luar-Negeri> diakses pada 23 Agustus 2016

dan Perlindungan TKI sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2006.²³

Perlindungan WNI dan TKI diluar negeri diantaranya di Arab Saudi dan Iran hanya berbentuk antisipasi sebelum terjadinya konflik yang lebih besar.Indonesia tidak menginginkan konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran ini menjadi konflik terbuka yang dapat merugikan Indonesia.

Berikut merupakan data pengiriman TKI diseluruh Dunia;²⁴

Tabel 1.2 Penempatan TKI dari Tahun 2011 s/d 2014

No.	Tahun	Jumlah Penempatan TKI	TKI Formal	%	TKI Informal	%
1.	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2.	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3.	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4.	2014	429.872	247.610	58	182.262	42

Sumber : Subdit Pengolahan Data Puslitfo BNP2TKI 2014

Berikut merupakan data Jumlah TKI di Arab Saudi :

Tabel 1.3 Jumlah TKI di Arab Saudi

Tahun	Jumlah
2012	40.655
2013	45.394
2014	44.325

²³ Buku Diplomasi Indonesia 2011, hal.242

²⁴<http://www.bnp2tki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang>

2015	23.000
2016 (Januari-Juli)	8.563

Sumber :Puslitfo BNP2TKI

Tidak hanya WNI di Arab Saudi, WNI di Iran juga terbilang banyak. Hal ini dibuktikan dengan jumlah WNI pada tahun 2011 berjumlah 483 dan pada tahun 2014 sebanyak 471. Ini membuktikan, pentingnya Indonesia dalam menengahi konflik agar konflik tersebut tidak bertambah besar.

Dari data diatas menunjukkan bahwa Indonesia banyak mengirim TKI atau WNI ke negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi dan Iran.dan apabila konflik dikedua negara tersebut tak terselesaikan atau bahkan sampai pada konflik perang akan merugikan negara-negara regional disekitarnya atau negara-negara yang memiliki kepentingan dikedua negara tersebut. Hal itupun akan berdampak pada Indonesia sendiri, apabila terjadi perang akan mengancam keselamatan WNI di Arab Saudi dan Iran. oleh karenanya Indonesia mengajukan diri untuk menjadi mediator di konflik tersebut.